



Mewujudkan Ketahanan Energi dan Keberlanjutan

KEAMANAN DAN KEPASTIAN ENERGI AKAN DIPEROLEH JIKA DAPAT MENJAMIN KETERSEDIAAN, PENERIMAAN MASYARAKAT, KETERJANGKAUAN, DAN JAMINAN AKSES DARI SUMBER ENERGI.



11 Mendorong Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan

24 Wakil Ketua BPK Lakukan Supervisi Langsung Pemeriksaan Atas IMO

33 Keajaiban Berpuasa Bagi Kesehatan Fisik dan Mental



PENGARAH

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Maret merupakan bulan yang memiliki banyak momentum untuk mengingatkan diri kita untuk menjaga lingkungan. Pada 21 Maret, misalnya, kita memperingati Hari Hutan Sedunia. Kemudian pada 22 Maret kita juga memperingati Hari Air Sedunia.

Karenanya, pada edisi Maret 2023 ini, redaksi menyiapkan isu-isu yang terkait dengan lingkungan dan energi berkelanjutan. Di rubrik BPK Bekerja, misalnya, kami menurunkan laporan mengenai upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendorong transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terkait efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan tahun anggaran (TA) 2019 sampai semester I 2021 di wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam mengelola program transportasi berkelanjutan. Terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor transportasi, pengintegrasian transportasi perkotaan wilayah Jabodetabek, dan pelaksanaan upaya konservasi energi sektor transportasi.

Di rubrik Sudut Pandang, redaksi menyiapkan hasil wawancara dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif. Dia menjelaskan mengenai upaya kementerian dalam menyusun *roadmap* transisi energi untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Hal ini antara lain dilakukan melalui sejumlah strategi. Mulai dari mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) secara masif, termasuk hidrogen dan nuklir, *retirement* PLTU, hingga penggunaan kendaraan listrik.

Simak juga opini dari Jumansyah, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia yang berbicara mengenai pelaporan pemerintah untuk perubahan iklim. Dia menjelaskan, antara lain, model pelaporan perubahan iklim yang sementara ini berjalan adalah model pelaporan yang digunakan oleh korporasi.

Model ini dikembangkan oleh TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Model ini terdiri dari 4 tema yang merupakan representasi elemen-elemen inti bagaimana organisasi beroperasi, yaitu tata kelola (*governance*), strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.

Selain terkait lingkungan, redaksi juga menyiapkan banyak laporan menarik lainnya. Misalnya saja, rapat koordinasi pelaksana BPK tahun 2023 yang digelar awal Maret 2023 untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Rapat yang mengangkat tema "Harmoni untuk Mewujudkan BPK Makin Kuat dan Makin Hebat" ini turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ada pula laporan mengenai *knowledge transfer forum* (KTF) dengan tajuk "Identifikasi Indikasi Persekongkolan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Pendekatan Data Analytics". Diskusi ini digelar untuk membantu pemeriksa mengidentifikasi risiko kecurangan dan menilai risiko atas ketidakpatuhan terhadap peraturan yang disebabkan karena kecurangan.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan untuk seluruh pembaca yang budiman. Tak ketinggalan, redaksi juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim di Tanah Air. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. ~



4 » Bersama Sukseskan Pembangunan Nasional

Perkembangan ekonomi dan keuangan negara merupakan pertimbangan penting untuk menentukan strategi pemeriksaan.



8 » Demi Lingkungan Berkelanjutan

BPK sebagai lembaga pemeriksa negara memiliki andil penting untuk memastikan program dan komitmen pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan agar berjalan sesuai arah.



11 » Mendorong Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program transportasi berkelanjutan, Kemenhub telah menjalankan beberapa upaya.

- 15 » Mengendus Indikasi Persekongkolan dalam Proses Tender Pemerintah
- 19 » Pemenuhan Prinsip-Prinsip Ketahanan Energi dan Keberlanjutan
- 22 » Delegasi BPK Hadiri SOM SAI20 di India
- 23 » Bersama ANAO, BPK Lakukan *Peer Review* Terhadap MNAO
- 24 » Wakil Ketua BPK Lakukan Supervisi Langsung Pemeriksaan Atas IMO
- 25 » BPK Jelaskan Pentingnya Kerja Sama Audit dengan APH di Bangkok
- 26 » Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 'BPK Berperan Sukseskan Transisi Energi'
- 31 » Kenali dan Cegah Praktik Perundungan di Tempat Kerja
- 33 » Keajaiban Berpuasa Bagi Kesehatan Fisik dan Mental
- 36 » BPK Sampaikan Dua LHP kepada SKK Migas
- 37 » BPK Terima LKPD DKI Jakarta Tahun 2022 Unaudited
- 38 » BPK Kunjungi Perusahaan Pengolahan Limbah B3
- 40 » Pelaporan Pemerintah untuk Perubahan Iklim
- 44 » Berita Foto

Bersama Sukseskan Pembangunan Nasional

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN NEGARA
MERUPAKAN PERTIMBANGAN PENTING UNTUK MENENTUKAN STRATEGI PEMERIKSAAN.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini penting agar pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat semakin bermanfaat bagi program pembangunan nasional.

Salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi pelaksana BPK tahun 2023 pada awal Maret yang turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat koordinasi itu mengangkat tema "Harmoni untuk Mewujudkan BPK Makin Kuat dan Makin Hebat".

Ketua BPK Isma Yaton dalam sambutannya mengatakan, perkembangan ekonomi dan

keuangan negara merupakan pertimbangan penting untuk menentukan strategi pemeriksaan atas prioritas dalam rangka pemberian *assurance* dan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. "Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, terutama terkait manfaat hasil pemeriksaan, BPK mengoptimalkan kebutuhan sumber daya untuk pemeriksaan dan penguatan kapasitas kelembagaan BPK," kata Ketua BPK.

Ketua BPK menyampaikan, BPK pada semester I 2023 sedang melaksanakan pemeriksaan atas seluruh Laporan Keuangan 2022 baik pada pemerintah pusat, termasuk pinjaman dan hibah luar negeri, pemerintah daerah, serta badan lain seperti Bank Indonesia dan lainnya dengan lebih dari 680 entitas yang tersebar di seluruh Indonesia.



■ Ketua BPK Isma Yatun

Selain itu, BPK memeriksa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan Partai Politik (Banparpol) pada Kementerian Dalam Negeri dan 542 entitas Pemerintah Daerah. "Pemeriksaan keuangan tersebut menyerap lebih dari 50 persen sumber daya BPK, baik keuangan dan SDM. Kami pun berharap pemeriksaan laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat berupa peningkatan *stakeholder's confidence* atas keuangan negara," ucap dia.

PEMERIKSAAN KINERJA DAN PDDT

Adapun pada semester II 2023, BPK direncanakan melakukan pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (atau PDDT) atas prioritas nasional (PN) sesuai RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah. BPK akan memeriksa pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan (pada PN 2) serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (pada PN4).

"BPK dalam melakukan pemeriksaan juga memperhatikan pemutakhiran prioritas pemerintah serta isu publik yang berkembang. Makanya kami mengundang Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas ke dalam kegiatan ini," kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, BPK juga memeriksa implementasi dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 2.2, yakni Penanganan *Stunting* serta berperan dalam memberikan *assurance* terhadap *Voluntary National Review* atas capaian SDGs Indonesia.

Secara kelembagaan, BPK juga menerbitkan *Sustainability Report* untuk meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan. Kemudian, BPK merencanakan seminar internasional bertemakan "Leveraging Performance Audit Impacts on Green Economy and SDGs" yang akan diadakan pada Mei 2023.



Pemeriksaan keuangan tersebut menyerap lebih dari 50 persen sumber daya BPK, baik keuangan dan SDM. Kami pun berharap pemeriksaan laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat berupa peningkatan *stakeholder's confidence* atas keuangan negara.

Dalam mendukung pemberantasan korupsi, pemeriksaan investigatif BPK terus ditingkatkan kecepatan dan kualitasnya melalui pemanfaatan Laboratorium Digital Forensik. Seluruh satker pemeriksaan juga dapat memanfaatkan laboratorium tersebut, khususnya untuk identifikasi dan respons atas *risiko fraud*.

"Hasil pemeriksaan BPK telah memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh entitas. Tindak lanjut hasil pemeriksaan juga berupa pengembalian uang dan atau penyerahan aset negara senilai Rp124,60 Triliun dalam kurun waktu 2005 hingga semester I 2022," ungkap dia.

SINERGI BPK DAN BAPPENAS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, RPJMN 2020-2024 difokuskan pada percepatan pembangunan dengan meletakkan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh. Selama ini, RPJMN menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang lebih terperinci secara sektoral di daerahnya masing-masing.

"Seperti kita ketahui, terdapat 9 visi misi Presiden dan kemudian dijabarkan menjadi 5 arahan presiden dan 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. 7 agenda pembangunan tersebut yang kemudian diacu dalam rencana kerja pemerintah melalui 7 prioritas nasional," kata Suharso saat memberikan pidato kunci dalam acara Rakor Pelaksana BPK Tahun 2023.

Selama periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024, sebagian besar sasaran pembangunan dinilai menunjukkan perbaikan. Beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan adalah pertumbuhan ekonomi, penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karena itu, target yang ditetapkan harus lebih detail dan sesuai dengan kondisi terkini. "Pencapaian tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan Rencana Kerja Pemerintah yang lebih fokus," ucap dia.

Sesuai dengan target, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 pun memiliki tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan



■ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa



Dengan tantangan pada berbagai dimensi berdaulat tadi maka dalam rancangan awal RPJPN 2025-2045 prioritas utama pada transformasi Indonesia yang terdiri dari transformasi sosial, ekonomi, dan transformasi tata kelola yang didukung oleh stabilitas dan pembiayaan pembangunan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

berkelanjutan. Tema ini pun sesuai 7 prioritas nasional dengan penekanan pada program strategis yang mampu menjadi pencapaian sasaran pembangunan.

Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memberikan sejumlah pelajaran. Pertama, pentingnya sinkronisasi dan penjabaran rencana kerja nasional, rencana jangka menengah nasional, dan rencana tahunan nasional. Kedua, ungkap dia, pentingnya pengendalian pembangunan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Ketiga, menurut dia, pentingnya penerapan-penerapan prinsip perangkat kerja khusus dan hierarki kinerja pada penyusunan dokumen perencanaan dan manajemen risiko pembangunan nasional. Bappenas di saat yang sama juga telah mengembangkan GRC (*government, risk and compliances*) di beberapa major project.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mempertimbangkan beberapa isu utama. Pertama, semua wajib memahami bahwa selama lebih dari 28 tahun, Indonesia masih berada di posisi *Middle Income Country*. Sehingga, perlu dilakukan sebuah transformasi besar-besaran, termasuk transformasi ekonomi.

Pembangunan sosial juga masih tertinggal. Ini tecermin dari beberapa aspek, antara lain, penurunan angka kemiskinan yang melambat, perlindungan sosial yang masih terfragmentasi, kesenjangan partisipasi, dan kualitas pendidikan serta permasalahan sistem kesehatan. Hal ini menunjukkan urgensi perlu dilakukannya transformasi sosial.

Tata kelola aspek kelembagaan dan regulasi juga masih menjadi kendala utama atas belum efektifnya pemerintahan. Hal ini menunjukkan urgensi bahwa transformasi tata kelola diperlukan dukungan tata



■ Menteri Keuangan, Sri Mulyani

“**Tapi Indonesia harus melihat tantangan dan risiko baru yang lebih dari sekarang di sisi keuangan, yaitu *financial volatility* atau volatilitas keuangan.**”

kelola keuangan negara yang baik yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. "Dengan tantangan pada berbagai dimensi berdaulat tadi maka dalam rancangan awal RPJPN 2025-2045 prioritas utama pada transformasi Indonesia yang terdiri dari transformasi sosial, ekonomi, dan transformasi tata kelola yang didukung oleh stabilitas dan pembiayaan pembangunan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi," tutur dia.

Dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, dibutuhkan keselarasan, perencanaan, dan penganggaran pusat dan daerah mutlak diperlukan. Keselarasan meliputi konsistensi, antar dokumen perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pusat dan daerah juga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Penerapan sebuah organisasi perencanaan perlu dikendalikan, antara lain, melalui penerapan jumlah risiko dengan dukungan sistem informasi yang terpadu. "Besarnya harapan kami terhadap BPK dalam memperkuat pengendalian pembangunan dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, pengendalian harus dilakukan sejak tahap perencanaan," ungkap dia.

Suharso berharap BPK mendukung pengerjaan dokumen perencanaan dalam dokumen perencanaan turunan sektoral dan negara, termasuk pada alokasi penganggaran yang konsisten dengan prioritas pembangunan.

Pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dan akuntabel juga penting. BPK diharapkan dapat diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas tata kelola pelaksanaan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan negara. Peran krusial BPK tersebut menjadi kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya menjelaskan, pengelolaan keuangan negara tidak bisa lepas dari kondisi ekonomi. Indikator dan variabel yang ada di keuangan negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. "Pada saat kita diterpa pandemi tiga tahun itu, kita seperti tidak bisa berkegiatan. Tapi melihat sekarang perekonomian Indonesia selama Kuartal IV terus tumbuh di atas 5 persen, kemudian ekonomi di Indonesia termasuk yang cukup stabil, cepat dan tertinggi di antara negara-negara di G20 dan ASEAN," ucap dia.

Kestabilan dan pertumbuhan menjadi bekal bagi Indonesia untuk terus optimistis. Akan tetapi, Indonesia tetap harus waspada karena tantangan bergeser dari yang tadinya berasal dari pandemi Covid-19 ke tantangan global yang dampaknya tidak bisa disepelekan.

"Kita lihat di dalam tatanan geopolitik global berubah dan dukungan antar negara mengeras."

Permasalahan rantai pasok global juga menyebabkan inflasi meningkat signifikan secara global. Dia bersyukur karena Indonesia bisa mengatasi berbagai kejadian luar biasa tersebut.

"Tapi Indonesia harus melihat tantangan dan risiko baru yang lebih dari sekarang di sisi keuangan, yaitu *financial volatility* atau volatilitas keuangan." ~

Demi Lingkungan Berkelanjutan



FREEPIK.COM

BPK SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA NEGARA MEMILIKI ANDIL PENTING UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM DAN KOMITMEN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN AGAR BERJALAN SESUAI ARAH.

Perubahan iklim merupakan ancaman nyata semua negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Dampak dari ancaman perubahan iklim pun kian terasa, mulai dari musim kemarau berkepanjangan hingga musibah hidrometeorologi yang semakin sering terjadi.

Aktivitas penggunaan bahan bakar fosil menjadi salah satu pemicunya. Atas alasan itu, pemerintah telah berkomitmen mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengencakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara, memiliki andil penting untuk memastikan program dan komitmen pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan agar berjalan sesuai arah. Berbagai program harus terus dikawal demi mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau dan

Praktisi Energi Terbarukan Dicky Edwin Hindarto mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan BPK adalah dengan mengawal implementasi transisi energi melalui fungsi pemeriksaan yang dimiliki.

"BPK harus mampu untuk mendorong percepatan implementasi transisi energi dan pembanguan energi terbarukan dengan cara memeriksa keuangan pemerintah yang lebih condong ke energi kotor," kata Dicky kepada *Warta Pemeriksa*.

Menurut Dicky, pemerintah tampaknya telah salah arah dalam pengembangan energi masa depan, terutama soal energi terbarukan. Hal ini karena pemerintah menerapkan dualisme dalam pengelolaan energi.

Di satu sisi, pemerintah meluncurkan beragam rencana pengembangan energi terbarukan, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan *net zero emission* (NZE). Akan tetapi di sisi lain, pemerintah secara nyata mendukung batu bara.

"Pemerintah memang meluncurkan banyak target pengembangan energi terbarukan, cuma secara kasat mata pemerintah masih mendukung batu bara," kata Dicky kepada *Warta Pemeriksa*.

Dia mengungkapkan, PLN yang saat ini kelebihan daya di wilayah Jawa dan Madura, sebagian besar pembangkitnya menggunakan batu bara. Selain itu, ekspor batu bara masih sangat besar. Sumber energi hilirisasi nikel melalui *smelter* bahkan disebut masih diperoleh lewat pembangkit batu bara.

Dicky menambahkan, persyaratan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, khususnya surya atap juga masih sulit. Adanya aturan baru PLN yang hanya membolehkan maksimal membangun 15 persen listrik dari tenaga surya menyebabkan industri atau bahkan rumah tangga, tidak ekonomis lagi dalam membangun energi surya untuk keperluan sendiri.

Kondisi itu membuat masyarakat hanya bisa pasrah menerima apa yang ditentukan pemerintah. "Masyarakat mau hemat energi ditawarkan kenaikan daya. Sementara PLN enggan membeli dari pembangkit tenaga surya karena memang kelebihan daya," ucap dia.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu arah kebijakan pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan, yang salah satunya dicapai melalui pengembangan pembangkit berbasis EBT.

Untuk mengawal program tersebut, BPK telah melaksanakan sejumlah pemeriksaan terkait pengembangan EBT di Tanah Air. Ada sejumlah permasalahan yang ditemukan BPK.



■ Dicky Edwin Hindarto

[LINKEDIN.COM/IN/DICKY-EDWIN-HINDARTO](https://www.linkedin.com/in/dicky-edwin-hindarto)

BPK harus mampu untuk mendorong percepatan implementasi transisi energi dan pembangunan energi terbarukan dengan cara memeriksa keuangan pemerintah yang lebih condong ke energi kotor.

Beberapa permasalahan terkait program EBT pada PLN, antara lain, PLN tidak memiliki rencana pencapaian bauran EBT yang terperinci dan aplikatif. Pengadaan tenaga listrik EBT juga belum memperhatikan harga keekonomian. Selain itu, PLN belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pembangkit EBT.

Pemeriksaan itu juga dilakukan terhadap Pertamina, utamanya terkait pengembangan panas bumi. Beberapa permasalahan dalam kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan EBT, antara lain, kebijakan perencanaan kegiatan eksploitasi belum sepenuhnya mendukung kebijakan energi nasional penggunaan EBT. Perencanaan pengeboran juga belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.

BPK juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap PT Geo Dipa Energi terkait upaya peningkatan EBT. Hasil pemeriksaan itu telah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan PT GDE tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat areal kegiatan operasi PT GDE Unit Patuha dan Unit Dieng berada di kawasan hutan lindung di luar izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta kewajiban-kewajiban atas terbitnya IPPKH belum dipenuhi oleh PT GDE. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan produksi PT GDE di Dieng dan Patuha berpotensi meningkatkan terjadinya kerusakan hutan dan memunculkan risiko hukum atas ketidaksesuaian dalam penggunaan IPPKH. Selain itu, hak negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan kawasan hutan tidak dapat ditagihkan. ~



SEMAKIN MUDAH
MENGAKSES INFORMASI
MELALUI
BERBAGAI PLATFORM



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



@bpkriofficial



www.bpk.go.id

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Mendorong Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan

DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM TRANSPORTASI BERKELANJUTAN, KEMENHUB TELAH MENJALANKAN BEBERAPA UPAYA.



NAJWAN ARFA-PEXELS

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terkait efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan Tahun Anggaran (TA) 2019 sampai semester I 2021 di wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK mencatat, dalam rangka mendukung pelaksanaan program transportasi berkelanjutan, Kemenhub telah menjalankan beberapa upaya. Hal itu antara lain pembentukan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pelaporan atas kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi. Selain itu, melaksanakan penyusunan regulasi yang mengatur integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek.



ARIF RIYANTO-UNSPASH



Kemudian, melaksanakan kegiatan untuk mendukung program pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi antara lain pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik disertai penyediaan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan penerbitan surat registrasi kendaraan bermotor listrik.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam mengelola program transportasi berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi, pengintegrasian transportasi perkotaan wilayah Jabodetabek, dan pelaksanaan upaya konservasi energi sektor transportasi.

Permasalahan tersebut antara lain Kemenhub belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK di sektor transportasi. Hal ini antara lain terlihat pada regulasi terkait dengan pengurangan emisi GRK pada sektor transportasi yang belum lengkap dan regulasi yang ada belum dilaksanakan secara optimal.

Target penurunan emisi GRK pada sektor transportasi yang ditetapkan dalam Renstra Kemenhub 2020-2024 belum didukung oleh peraturan pelaksana sehingga implementasi kegiatannya kurang terukur dibandingkan sebelumnya yang telah didukung dengan peraturan. Selain itu, belum terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) atau petunjuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam hal pembagian, koordinasi, pemantauan rencana aksi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas penurunan emisi GRK sektor transportasi.

Hal ini mengakibatkan perencanaan, target, formulasi, pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penurunan GRK sektor transportasi pada Kemenhub tidak memiliki standar yang sama. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menyusun peraturan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

”
Terdapat program yang seharusnya sudah diselesaikan pada tahun 2019 (tahap I) ataupun tahun 2020, namun sampai pada saat pemeriksaan, program tersebut masih belum selesai dan/atau belum dilaksanakan.



penurunan emisi GRK sektor transportasi tahun 2021.

Kemenhub belum efektif dalam melaksanakan integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek.

Kemenhub telah menetapkan regulasi terkait dengan integrasi moda transportasi umum di wilayah Jabodetabek yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RITJ, di antaranya pelaksanaan kegiatan belum sesuai target.

Terdapat program yang seharusnya sudah diselesaikan pada tahun 2019 (tahap I) ataupun tahun 2020, namun sampai pada saat pemeriksaan, program tersebut masih belum selesai dan/atau belum dilaksanakan. Selain itu, terdapat program atau strategi dalam RITJ yang tidak dapat dilaksanakan dan juga belum ditemukan dokumen resmi atau aturan yang menyatakan pembagian fungsi koordinasi dari setiap program yang terdapat pada RITJ.

Fungsi koordinasi dari program tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi dari tugas pokok dan fungsi yang dianggap tepat dengan direktorat teknis terkait. Akibatnya, pelaksanaan RITJ tidak dapat diukur pencapaiannya, serta terdapat perbedaan tolak ukur pelaksanaan RITJ antara Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) selaku yang menjalankan fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan *stakeholder* lainnya sebagai pelaksana.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar mengoptimalkan peran BPTJ sebagai fungsi koordinator penyusunan rencana aksi, pemantauan dan evaluasi.

Kemenhub belum sepenuhnya berkontribusi terhadap upaya konservasi energi di sektor transportasi. Hal tersebut terlihat pada Kemenhub yang belum memiliki rencana aksi untuk mendukung program pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi.

Dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) telah menyusun rencana dan upaya untuk menghadapi tantangan yang ada dengan menyusun draf peta jalan transformasi KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum, serta menyusun upaya tindak lanjutnya.

Namun, hal ini masih dalam pembahasan sehingga sampai pemeriksaan berakhir, Kemenhub belum menetapkan atau menyerahkan peta jalan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Program KBLBB. Akibatnya, pelaksanaan pemanfaatan energi baru terbarukan pada kendaraan operasional pemerintahan dan kendaraan umum tidak dapat berjalan optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menyusun peta jalan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas kinerja transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek pada Kemenhub mengungkapkan enam temuan yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan. ~



Juara 2

Lomba Desain Batik HUT ke-76 BPK

Judul Karya: Batik Integritas, Independensi dan Profesionalisme (IIP) BPK
Peserta : Ridha Yamin (BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)





Mengendus **Indikasi Persekongkolan dalam Proses Tender Pemerintah**

PERSAINGAN TIDAK SEHAT AKAN MENGHASILKAN HARGA YANG TIDAK WAJAR DAN PADA AKHIRNYA BERAKIBAT PADA KERUGIAN NEGARA.

SENTA/O-FREEPIK

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mewajibkan pemeriksa untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan menilai risiko atas ketidakpatuhan terhadap peraturan yang disebabkan karena kecurangan. Pemahaman atas pengendalian terkait risiko kecurangan ini wajib dimiliki oleh para pemeriksa.

Hal ini menjadi latar belakang penting terlaksananya Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tajuk 'Identifikasi Indikasi Persekongkolan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Pendekatan Data Analytics' yang digelar secara daring pada Senin (27/2/2023).

Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V Juska Meidy Enyke Sjam menyampaikan, dari data yang terdapat pada BPK Big Data Analytics (Bidics) tahun 2022, terlihat ada nilai pengadaan secara nasional sebesar Rp135 triliun. "Tentu ini jumlah yang fantastis, sehingga untuk memudahkan para pemeriksa dalam pengambilan sampel yang bisa mengarahkan kepada *fraud* diperlukan cara-cara tertentu dan paling memudahkan adalah dengan bantuan teknologi informasi," ungkap Juska.



■ Laode Nusriadi

“**Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan pemeriksa. Saya berharap kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa.**”

KTF ini menghadirkan tim dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah memenangkan lomba Data Analytics Challenge pada HUT BPK ke-76. Tim berbagi pengetahuan kepada para pemeriksa di seluruh perwakilan BPK serta auditorat di lingkungan AKN V dan VI.

"Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan pemeriksa. Saya berharap kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa," ungkap Auditor Utama Keuangan Negara V Laode Nusriadi.

Narasumber sekaligus pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung Handoko Arianto menyampaikan, tema yang diusung dalam KTF tersebut merupakan hal yang penting untuk diketahui bersama. Dia menjelaskan, pada umumnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak dilaksanakan secara populasi. Hal tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh BPK baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), waktu, maupun biaya.

"Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan dengan pendekatan uji petik atau *sampling*. Tentu, *sampling* yang dilakukan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Handoko.



■ Juska Meidy Enyke Sjam



■ Handoko Arianto



■ Rakhmat Alfian



Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan dengan pendekatan uji petik atau *sampling*. Tentu, *sampling* yang dilakukan harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

PROSES TENDER PEMERINTAH

Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2013, proses tender Kementerian/Lembaga/Setuan Kerja Perangkat Daerah/instansi lainnya wajib dilakukan melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Masing-masing K/L/D/I membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pengelola SPSE, dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan tender untuk setiap kegiatan.

Bagaimana jika K/L/D/I tidak memiliki SPSE?

INDIKASI ADANYA PERSEKONGKOLAN

Lampiran I, II, dan III Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 butir 4.2 terkait Evaluasi Dokumen Penawaran

Sekurang-kurangnya 2 (dua):

- Terdapat kesamaan dokumen penawaran/teknis
- penawaran beberapa peserta mendekati HPS dan/atau hampir sama
- **keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali**
- adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran
- jaminan penawaran dan penjamin yang sama dengan nomor seri berurutan

MEMBUAT AKUN DAN MEMINTA DATABASE SPSE

1. Kita perlu membuat akun sebagai auditor.
2. Meminta database aplikasi SPSE

Caranya yaitu dengan menghubungi UKPBJ K/L/D/I dan meminta melalui surat permintaan.

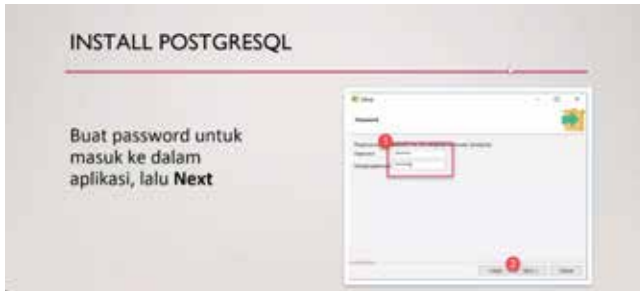
Salah satunya, adalah pertimbangan profesional dalam penentuan uji petik secara non-probabilistik non-statistik. Pertimbangan profesional tersebut antara lain adalah risiko-risiko yang lekat pada suatu objek pemeriksaan.

Dia melanjutkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat proses utama yang di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini menjadi salah satu fokus BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.

Salah satu risiko yang sering terjadi dalam proses pemeriksaan barang dan jasa adalah pengaturan atau persekongkolan yang mengakibatkan adanya persaingan tidak sehat. Biasanya, ungkap Handoko, persaingan tidak sehat akan menghasilkan harga yang tidak wajar dan pada akhirnya berakibat pada kerugian negara.

Saat ini, proses tender pemerintah telah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dia menjelaskan, persekongkolan pada tender merupakan perbuatan kolusi untuk memanipulasi proses tender demi memenangkan perusahaan tertentu. Persekongkolan ini dapat dilakukan antar-perusahaan peserta tender atau horizontal, melibatkan panitia atau vertikal, maupun gabungan keduanya.

Handoko menyatakan, indikasi adanya persekongkolan dijelaskan dalam Lampiran I, II, dan III peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 butir 4.2 terkait Evaluasi Dokumen Penawaran.



Dalam database ini kita bisa melihat apakah ada kesamaan log access antara peserta dan PPK (pejabat pembuat komitmen) penyedia.

Beberapa indikasi itu antara lain terdapat kesamaan dokumen penawaran/teknis, penawaran beberapa peserta mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) dan/atau hampir sama, keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, dan jaminan penawaran dari penjamin yang sama dengan nomor seri berurutan. Khusus dalam KTF kali ini, kata Handoko, pembahasan akan fokus pada indikasi keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.

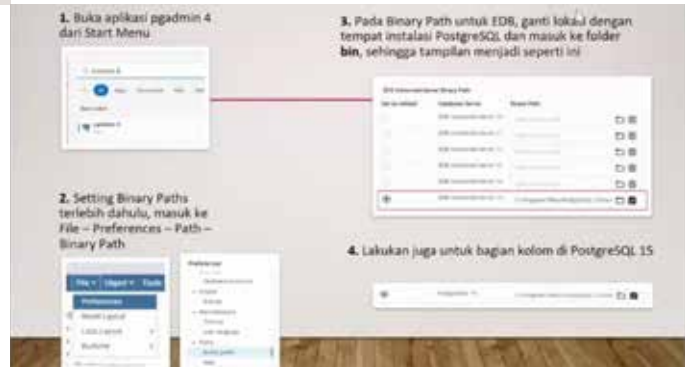
Bagaimana cara untuk menemukan adanya persekongkolan tersebut? Handoko menjelaskan, terkait indikasi peserta yang berada dalam satu kendali, hal itu dilihat dari kesamaan akses media dan IP address peserta tender. Kemudian, bisa juga dilihat dari kesamaan personel peserta tender seperti pemilik, pengurus, staf ahli, dan manajerial. Selain itu, kesamaan *properties* dan *meta data* dokumen penawaran peserta tender.

"Tentu untuk bisa melakukan analisis tersebut kita perlu membuat akun sebagai auditor pada aplikasi SPSE dan meminta database SPSE melalui entitas pemeriksaan," ujarnya.

Dalam KTF tersebut, Handoko mempraktikkan kiat untuk bisa menganalisis indikasi persekongkolan dengan bantuan teknologi informasi. Menurutnya, hal ini dapat membuat proses analisis lebih efisien sekaligus efektif untuk mengungkap indikasi persekongkolan yang ada.

Handoko menyampaikan, apabila setelah dilaksanakan analisis IP address tidak terjadi permasalahan terkait proses tender maupun hasil kontrak, bukan berarti upaya ini tidak efektif. Justru, menurut dia, hasil analisis IP address atau indikasi persekongkolan ini membuat BPK dalam posisi kuat terkait pemilihan sampel.

"Yang penting, kita dalam memilih sampel tersebut tidak salah. Berbeda halnya, apabila kita memilih sampel tanpa didasari risiko apapun," ungkapnya.



ID	timestamp	nama	alamat
1	5 08:23:02	PT Sugiha Jemberkaha	Jl. 611 Muhi Mempel No. 168 & Jemberkaha Liris - Jakarta Barat
2	4 02:08:00	CV DODOP	Jln. Mekar No. 21 Hadrinjaya Barat Kota Madya
3	5 13:08:27	Sangon Jaya Abadi	Jl. Pemuda No. 118 Muhi No. 201-202 Gunung Sugi Kumpang Kec. Gunung Sugi Kab. Lery
4	5 13:01:58:501	cv. Ananta Jaya Abadi	Jl. Beringin Suko Tanjung Merto Peninggan Kec. Tanjung Beringin Tengah Kabupaten Tala
5	5 02:48:22	CV BAYUTAMA JAYA	Jl. Suni Kapanon No. 4-21 Bumi Wases Tegal Buntung Selatan
6	5 00:00:00	CV PLUMETI CIBIN ABEKOT	Sig. Kumpang No. No. 301-202 Krt. Sugiha Jaya Kec. Gunung Sugi
7	5 00:00:14:404	CV SANAA ELECTRIC	Jl. Sultan Iskandari Sig. Datar No. 254 Sugiha Merto Tanjung Karang Barat Bandar Lany
8	9 18:58:15	CV Waskarya	Jalan Datar jalan lin. 25 kedaton
9	4 00:04:20 118	CV TANOGA NEZKI	Jl. Karya No. 14 Pal. 3rd Agust Kec. Barat, Kota Mider
10	5 17:38:25	CV gunung mening	Jember, Jalan pthahati 2 008 Ad No. 2 Jemberke Bandar Lampung
11	4 11:00:00:00	PT Ananta Jaya Abadi	Jl. Winda Mumpuni No. 101 A

Dia mengatakan, hal ini juga menjawab beberapa perhatian yang akhir-akhir ini dilontarkan pemangku kepentingan. Yaitu, terkait dasar BPK memilih sampel.

"Ini perlu menjadi perhatian kita, bahwa kita memilih sampel ada dasar risikonya. Salah satunya, ada indikasi persekongkolan. Kalau ternyata kita tidak menemukan permasalahan, setidaknya kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa memilih sampel tersebut," kata Handoko.

Sementara itu, pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung Rakhmat Alfian juga mempraktikkan proses analisis dengan memanfaatkan aplikasi Postgre SQL. Menurutnya, aplikasi ini membantu proses analisis lebih mendalam dan bisa mengungkap lebih banyak data. Dia mencontohkan, jika terdapat kondisi hanya ada satu peserta tender apakah bisa dianalisis adanya indikasi persekongkolan.

"Itu bisa. Dalam database ini kita bisa melihat apakah ada kesamaan log access antara peserta dan PPK (pejabat pembuat komitmen) penyedia. Dari situ bisa kita jadikan acuan apabila ada kesamaan IP address dan perangkat, maka itu bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya," ungkapnya. ~

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Ketahanan Energi dan Keberlanjutan

KEAMANAN DAN KEPASTIAN ENERGI AKAN DIPEROLEH JIKA DAPAT MENJAMIN KETERSEDIAAN, PENERIMAAN MASYARAKAT, KETERJANGKAUAN, DAN JAMINAN AKSES DARI SUMBER ENERGI.

Ketahanan energi sangat penting bagi sebuah negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara, menaruh perhatian terhadap ketahanan energi di Tanah Air. Berdasarkan kajian yang dilakukan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, ada sejumlah aspek yang wajib diperhatikan dalam menjaga ketahanan energi.

Cikal bakal mengenai arti penting ketahanan energi muncul pada saat mantan PM Inggris Winston Churchill menjawab kritikan atas konversi bahan bakar kapal-kapal perang Inggris dari batu bara ke minyak, yaitu "*safety and certainty in oil, lie in variety and variety alone*" (Daniel Yergin, 2006). Jawaban itu menekankan bukan hanya pada arti penting perlunya keamanan dan kepastian ketersediaan energi, tetapi juga arti penting energi bagi pertahanan suatu negara.

Keamanan dan kepastian energi yang diyakini pada saat ini akan diperoleh jika dapat menjamin ketersediaan (*availability*), penerimaan masyarakat (*acceptability*), keterjangkauan (*affordability*) dan jaminan akses (*accessability*) dari sumber energi atau lebih dikenal dengan prinsip 4'As. Prinsip 4'As yang harus dicapai secara seimbang agar dapat mewujudkan ketahanan energi dan mengelola implikasinya yang kompleks dan multidimensi kepada kondisi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, termasuk implikasi kepada hubungan perdagangan internasional, kedaulatan suatu negara, dan investasi.

Ketahanan energi tidak dapat dilihat secara parsial, jangka pendek, dan berdiri sendiri serta terlepas dari pengaruh kebijakan energi global dengan isu-isunya seperti perubahan iklim dan SDGs. Ketahanan energi menjadi kompleks karena selain aspek-aspek tersebut, juga meliputi dimensi-dimensi keberlanjutan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, serta dimensi *supply* dan *demand* dari sumber energi global yang semuanya saling berkaitan dan berinteraksi. Kompleksitas tersebut berkembang sejalan dengan berjalannya waktu dan mempunyai kadar yang berbeda dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Analisis atas kompleksitas dari ketahanan energi tersebut menjadi tujuan kajian ini. Kajian menganalisis implementasi

prinsip 4'As dari ketahanan energi di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder seperti laporan-laporan, kajian, literatur, dan jurnal dari Instansi dan lembaga pemerintah dan swasta serta institusi internasional.

Kajian pada sumber energi batu bara memberikan kesimpulan dalam bentuk aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi prinsip-prinsip ketahanan energi. Aspek-aspek penting dari implementasi prinsip 4'As dari ketahanan energi tersebut dapat menjadi dasar atau pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan.



Beberapa aspek penting hasil analisis atas implementasi prinsip 4'As dari ketahanan energi:

a Ketahanan energi mempunyai prinsip-prinsip 4'As yaitu *availability*, *acceptability*, *affordability*, dan *accessability* yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sehingga perlu dijaga keseimbangannya agar dapat mempunyai dampak untuk mencapai bukan hanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, melainkan juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

b Kebijakan terkait ketahanan energi perlu memperhatikan tidak hanya permasalahan stabilitas *supply* dengan harga yang murah atau terjangkau tetapi juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini seperti akses yang adil ke energi modern, pemerataan, dan keadilan serta mitigasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

c Seluruh program dan kegiatan terkait ketahanan energi pada tahap produksi dan pemanfaatan sumber energi perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi dan koheren dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan implementasi SDGs agar lebih efisien dan efektif.

d Ruang lingkup ketahanan energi pada saat ini tidak dapat diisolasi hanya pada variabel atau faktor domestik di suatu negara tetapi juga harus mencakup variabel atau faktor global seperti pola kebijakan ketahanan energi dan energi global, khususnya negara-negara tujuan ekspor dan asal impor batu bara (SDA) Indonesia serta negara-negara dan pihak-pihak yang akan investasi di Indonesia.

Aspek-aspek penting terkait energi dan ketahanan energi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Pertama, tujuan Pemeriksaan perlu mempertimbangkan ketahanan energi sebagai sarana bukan hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka pendek tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, sasaran pemeriksaan bersifat multi dimensi, terintegrasi dan koheren serta fokus kepada implementasi prinsip-prinsip ketahanan energi pada semua tahap (tahap produksi sampai dengan pemanfaatan sumber energi) yang bukan hanya fokus kepada stabilitas pasokan dan harga yang murah, tetapi juga fokus kepada aspek-aspek seperti akses yang adil ke energi modern, pemerataan, keadilan dan mitigasi perubahan iklim serta mitigasi kerusakan lingkungan lainnya (energi bersih dan efisien).

Ketiga, metodologi pemeriksaan mempertimbangkan untuk melakukan *benchmarking* dengan negara-negara lain, pendekatan *foresight*, berbasis risiko (untuk menentukan sumber energi prioritas) dan menggunakan analisis statistik termasuk *forecasting*, dan *system dynamic*, serta analisis integrasi dan koherensi pada semua kebijakan (UU dan turunannya di semua instansi pusat dan daerah), dan pada instrumen ekonomi dengan tujuan dan rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. ~



Instrumen ekonomi terkait ketahanan energi mulai dari perencanaan dan implementasi kegiatan (misalnya membangun neraca SDA dan LH, dan internalisasi biaya lingkungan hidup), pendanaan, dan insentif dan/atau disinsentif termasuk pajak, subsidi dan pengembangan teknologi, perlu dilakukan secara terintegrasi dan koheren dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan melibatkan semua *stakeholders* termasuk pemerintah daerah, industri dan RT.

Konversi energi fosil ke energi non-fosil (*renewable energy*) mempunyai dimensi dan variabel yang kompleks karena perlu mempertimbangkan semua tahapan terkait sumber energi mulai dari tahap produksi sampai dengan konsumsi, isu global (perdagangan internasional dan investasi), keberlanjutan infrastruktur sumber energi yang sudah ada (misalnya infrastruktur batu bara dan PLTU), dimensi waktu yang panjang dan berkelanjutan (bertahap), serta perlu menjamin keselarasan tahapan konversi dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Delegasi BPK Hadiri SOM SAI20 di India

SOM SAI20 INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KESUKSESAN KEPEMIMPINAN BPK PADA SAI20 TAHUN 2022.

Delegasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia menghadiri Senior Official Meeting (SOM) SAI20 di Kota Guwahati, Assam-India, Senin-Rabu (13-15 Maret 2023). Delegasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dan didampingi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman.

SOM SAI20 ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan kepemimpinan BPK pada SAI20 tahun 2022. SOM SAI20 digelar oleh *supreme audit institutions* (SAI) India sebagai Chair SAI 20 di bawah Presidensi G20 India tahun 2023.



■ Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif



Hadir juga dalam acara ini enam SAI anggota SAI20, yaitu SAI Australia, Brasil, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Turki. Turut hadir pula dalam pertemuan ini SAI Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, dan perwakilan dari Bank Dunia.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, SAI India mengambil tema pembahasan terkait "Blue Economy dan Responsible Artificial". Pada hari pertama SOM, delegasi memberikan pandangan dan pengalamannya mengenai penerapan pemeriksaan terkait "Blue Economy dan Responsible AI."

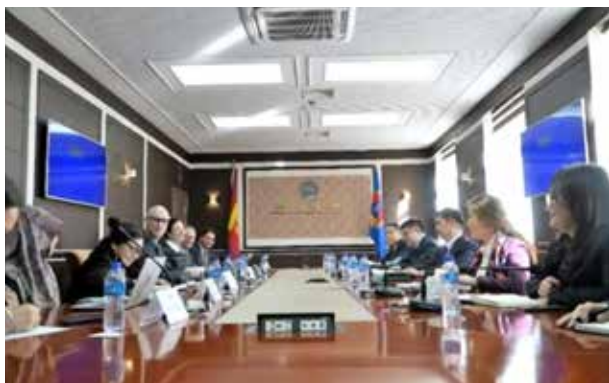
Sementara pada hari kedua, diagendakan pembahasan draf komunike yang akan disahkan di SAI20 Summit pada Juni 2023 di Goa, India. Pertemuan dibuka oleh the Comptroller and Auditor General (CAG) of India, Shri Girish Chandra Murmu.

Dalam sambutannya, dia menyampaikan bahwa CAG India telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas konservasi ekosistem pesisir. Pemeriksaan ini berperan penting dalam mengevaluasi upaya-upaya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan mekanismenya menuju pencapaian target SDG 14-Life below water.

Engagement group SAI20 ini penting dalam mendorong kerja sama antar-SAI. Khususnya dalam menciptakan kebijakan dan panduan yang dapat diterapkan pada masa mendatang. ~

Bersama ANAO, BPK Lakukan *Peer Review* Terhadap MNAO

FRAMEWORK YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN REVIU ADALAH KRITERIA SAI PMF YANG DIKEMBANGKAN INTOSAI.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Australian National Audit Office (ANAO) melakukan *tim joint peer review* terhadap Mongolia National Audit Office (MNAO). Keikutsertaan *reviewer* BPK dalam pemeriksaan yang dilakukan di Ulanbaatar Mongolia pada 6-15 Maret 2023 ini merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan pengalaman pemeriksa dalam pelaksanaan *peer review*.

Dalam kegiatan ini, BPK menugaskan dua *reviewer*, yaitu Fauzan Yudo Wibowo (kasubdit Litbang Kinerja) dan Prima Liza (kasubbid PKMP III). Sedangkan ANAO menugaskan tiga *reviewer*, yaitu Kristian Gage (sebagai ketua tim), Michael McGillion, dan Lauren Dell.

Peer review tersebut dilaksanakan dengan pendanaan dari Asian Development Bank di bawah proyek "Strengthening the Capacity of the State Audit Organization". Sementara, kerangka kerja atau *framework* yang digunakan untuk melaksanakan reviu adalah kriteria SAI Performance Management Framework (SAI PMF) yang dikembangkan INTOSAI.

Pada hari pertama (6/3/2023), *tim joint peer review* bertemu dengan Auditor General MNAO, D Zandanbat dan jajaran manajemen untuk *entry meeting*. Dalam kesempatan tersebut, Auditor General MNAO menyampaikan mengenai pentingnya kegiatan *peer review*.

Dijelaskan, tujuan pemeriksaan itu untuk menunjukkan kepada publik bahwa MNAO telah melakukan peningkatan independensi dan tata kelola internal SAI.

Sebagai ketua *tim joint peer review*, Kristian Gage berharap *peer review* berjalan lancar dan dapat melihat hasil dari proses reformasi hukum dan independensi yang dilakukan oleh MNAO.

Pelaksanaan *peer review* selama di Mongolia menggunakan metode reviu dokumen dan wawancara dengan jajaran di unit/departemen di MNAO. Termasuk di antaranya dengan kantor State Audit Offices di beberapa provinsi dan ibu kota. Pertemuan juga dilaksanakan dengan staf di MNAO untuk mendapatkan gambaran implementasi beberapa hal terkait domain yang direviu.

Sebelumnya, tim telah melaksanakan *desk review* di kantor masing-masing dan melakukan kerja bersama di kantor pusat BPK pada 27 Februari-3 Maret 2023. Di sela-sela pelaksanaan *peer review*, para *reviewer* juga berkesempatan melaksanakan *courtesy meeting* dan diskusi dengan Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif.

Dalam kesempatan tersebut dibahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melakukan *peer review*. Termasuk juga *lessons learned* dari pengalaman BPK ketika melakukan *peer review* sebelum-sebelumnya. ~



Wakil Ketua BPK Lakukan Supervisi Langsung Pemeriksaan Atas IMO

BPK BERHARAP PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MAUPUN PEMERIKSAAN KINERJA DAPAT MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pertemuan dengan International Maritime Organization (IMO) di kantor pusat IMO di London, Inggris, Kamis (16/3/2023). Pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi dua lembaga dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja IMO tahun anggaran (TA) 2022.

BPK diwakili oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang didampingi kepala Pusat Kemitraan Global selaku wakil penanggung jawab pemeriksaan, Ikhtaria Syaziah dan pengendali teknis pemeriksaan, Nanik Rahayu. Sedangkan IMO diwakili oleh sekretaris jenderal Kitack Lim.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan manajemen IMO selama pemeriksaan berlangsung. Baik saat pemeriksaan interim dan pendahuluan pada tahun lalu dan pemeriksaan terinci yang sedang berjalan saat ini. Wakil Ketua BPK juga mengomunikasikan hal-hal strategis terkait dengan pemeriksaan sebagaimana diwajibkan dalam standar pemeriksaan.

Selain melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal IMO, Wakil Ketua BPK juga melakukan kegiatan supervisi atas kegiatan pemeriksaan BPK atas IMO yang sedang



■ Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim.

berlangsung. Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan pemeriksaan BPK atas IMO. Ruang lingkup pemeriksaan berupa pemeriksaan laporan keuangan konsolidasi IMO. Terdiri atas laporan keuangan IMO, World Maritime University (WMU), dan International Maritime Law Institute (IMLI) untuk TA 2022. Sebelumnya BPK telah melakukan audit atas laporan keuangan WMU dan IMLI pada awal Februari 2023.

Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja atas IMO, periode ini merupakan tahun kedua. Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mendalami area kunci yang telah diidentifikasi pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada Oktober 2022.

BPK berharap pemeriksaan atas laporan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal. Termasuk juga tata kelola IMO sebagai *UN specialized agency*. ~



BPK Jelaskan Pentingnya Kerja Sama Audit dengan APH di Bangkok

KEIKUTSERTAAN BPK SEBAGAI PEMBICARA DALAM KEGIATAN INI MERUPAKAN BENTUK PERAN AKTIF BPK DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI PADA UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri kegiatan "Regional Workshop on Enhancing the Collaboration between Supreme Audit Institutions and Anti-Corruption Bodies". Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, Rabu (14/3/2023) ini, BPK hadir sebagai salah satu pembicara.

Kehadiran BPK ini untuk menjawab undangan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Sementara itu, tujuan kehadiran BPK adalah dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara lembaga audit dan lembaga antikorupsi.

Lokakarya diselenggarakan selama tiga hari, Rabu-Jumat (14-16 Maret 2023) di Grande Centre Point Hotel Ploenchit, Bangkok. Kegiatan ini mengundang perwakilan lembaga audit (*supreme audit institution-SAI*) dan lembaga antikorupsi (*anti-corruption bodies-ACB*) dari 24 negara Asia. Mulai dari Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Cina, India, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam.

Delegasi BPK diwakili oleh Auditor Utama Investigasi, Hery Subowo dan Kepala Auditorat



Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Hendratna Mutaqin.

Dalam paparannya, Hery Subowo menekankan pentingnya kerja sama lembaga audit dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga antikorupsi. Menurutnya, korupsi merupakan fenomena kompleks yang menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi sebuah negara.

Oleh karena itu, kerja sama lintas sektoral dan kolaborasi antarlembaga serta aliansi nasional dan regional dari otoritas terkait merupakan hal krusial. Ini pun menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks Indonesia, Hery Subowo menjelaskan pola kerja sama BPK dengan APH seperti Polri dan kejaksaan. Termasuk juga lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU). MoU tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian kasus korupsi.

Keikutsertaan BPK sebagai pembicara dalam kegiatan ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam memberikan kontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Sekaligus pengakuan atas kompetensi dan eksistensi BPK dalam kancah hubungan internasional. ~

Arifin Tasrif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

BPK Berperan Sukseskan Transisi Energi

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan telah mengajukan *Enhanced Nationally Nationally Determined Contribution* (ENDC) dengan target penurunan emisi pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia berkomitmen mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dengan target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun *roadmap* transisi energi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui sejumlah strategi, antara lain, mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) secara masif termasuk hidrogen dan nuklir, *retirement* PLTU, hingga penggunaan kendaraan listrik

Disitulah, menurut Kementerian ESDM, BPK berperan mengawal implementasi program transisi energi agar lebih akuntabel dan transparan. Berikut wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, belum lama ini.



■ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif

Percepatan transisi energi terus menjadi salah satu fokus Indonesia saat memegang Presidensi G-20 2022. Kesepakatan apa aja yang berhasil dicapai terkait transisi energi di masa Presidensi G-20 Indonesia 2022?

Di sektor energi, kita memiliki *Energy Transitions Working Group* (ETWG). ETWG dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dan diakhiri dengan Pertemuan Energy Transition Ministerial Meeting tanggal 2 September 2022 yang dihadiri 18 menteri (10 in-person dan 8 virtual), 6 Wakil Menteri (4 in-person dan 2 virtual), dan 10 pejabat lainnya dari 27 Negara. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan.

Kita menghasilkan dokumen G-20: *Bali Compact* (sembilan prinsip percepatan transisi energi dengan mempertimbangkan benefit bagi semua pihak tanpa meninggalkan siapapun dalam prosesnya, memahami perbedaan situasi dan kondisi tiap negara, dan pencapaian target-target global). Kesepakatan lainnya adalah berkomitmen menjadi bagian dari solusi kunci mengatasi krisis energi global yang terjadi. Lalu, sepakat memastikan ketercapaian target pembangunan global berkelanjutan di tahun 2030 khususnya akses energi modern yang handal, berkelanjutan dan terjangkau bagi semua.

Pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau untuk mendukung transisi energi, termasuk pentingnya kerjasama transfer pengetahuan dan inovasi teknologi, meningkatkan investasi dan mendorong aliran dana kepada negara berkembang untuk percepatan transisi energi, dan menekankan pentingnya kerjasama untuk percepatan transisi energi.



Pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau untuk mendukung transisi energi, termasuk pentingnya kerjasama transfer pengetahuan dan inovasi teknologi, meningkatkan investasi dan mendorong aliran dana kepada negara berkembang untuk percepatan transisi energi, dan menekankan pentingnya kerjasama untuk percepatan transisi energi.

Bali Compact merupakan kesepakatan bersama para anggota G-20 dalam peningkatan ambisi menuju transisi energi yang adil, terjangkau, dan inklusif yang tidak meninggalkan siapa pun (*no one left behind*) dan memastikan ketahanan energi, stabilitas, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan serta pengentasan kemiskinan energi. Adapun 9 kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional;
- Meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan;
- Mengamankan pasokan energi, infrastruktur, dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal;
- Meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi;
- Mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi;
- Mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau *Net Zero Emissions*;
- Berkolaborasi dalam memobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan Agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030 dan Paris Agreement;
- Meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi atau *Net Zero Emissions*;
- Membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, demonstrasi, diseminasi dan penerapannya.

Adapun, *Bali Energy Transitions Roadmap* merupakan suatu inisiatif untuk mendorong terjadinya kontinuitas dalam agenda global guna memperkuat kerja sama internasional dan arsitektur energi. Peta jalan ini menetapkan tindakan sukarela tahun jamak (*multiyear*) untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menetapkan jalan menuju nol emisi karbon atau karbon netral sesuai dengan kondisi nasional masing-masing negara.

Bali Energy Transitions Roadmap menjadi kerangka aksi dalam proses percepatan transisi energi yang diinisiasi Indonesia dan diharapkan dapat dilanjutkan dan diperkaya oleh Presidensi G-20 berikutnya yang secara berurutan dipegang oleh tiga negara berkembang, yaitu India, Brasil, dan Afrika Selatan.

Prioritas *Bali Energy Transition Roadmap* sebagai berikut:

a. Prioritas 1

Mengamankan Akses Energi

- Aksi 1: Fokus pada kebutuhan minimum energi modern dan konsep layanan energi yang terjangkau, andal, modern, dan berkelanjutan.
- Aksi 2: Maksimalkan pendekatan terintegrasi untuk *joint clean cooking* dan elektrifikasi.
- Aksi 3: Rencana aksi G20 untuk negara berkembang kepulauan kecil (SIDS) dan komunitas terisolasi.
- Aksi 4: Atasi kemiskinan energi yang muncul ketika energi menjadi tidak terjangkau dan tidak dapat diakses oleh rumah tangga yang rentan.

b. Prioritas 2

Meningkatkan Teknologi Cerdas dan Bersih

- Aksi 1: Memperkuat pendekatan seluruh Pemerintah kepada transisi energi bersih nasional melalui pertukaran *best practice* di G20.
- Aksi 2: Keterlibatan G20 yang efektif dengan kemitraan teknologi energi bersih global.
- Aksi 3: Meningkatkan pendanaan publik dan swasta global untuk pengembangan, peragaan, dan penerapan teknologi energi bersih.
- Aksi 4: Mempromosikan ketahanan dan keberlanjutan rantai pasokan energi bersih.

c. Prioritas 3

Meningkatkan Pendanaan Energi Bersih

- Aksi 1: Memperkuat pendanaan dan investasi energi bersih.
- Aksi 2: Mengembangkan pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif dalam skala besar.
- Aksi 3: Fokus pada kemajuan pembiayaan transisi energi bersih.
- Aksi 4: Mengembangkan hubungan yang lebih erat antara *G20 Energy Transition Working Group* dan *G20 Sustainable Finance Working Group*.

Sejauh mana komitmen negara-negara G-20 terkait transisi energi?

Seluruh negara G-20 telah menetapkan target *Net Zero Emission*-nya masing-masing. Sehingga yang diperlukan adalah langkah aksi nyata. Kepemimpinan Indonesia di G-20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 atau disebut Deklarasi Bali terdiri dari 52 paragraf.

Terdapat dua poin yang khusus membahas transisi energi pada Deklarasi KTT G20 di Bali, yaitu kesepakatan untuk mempercepat dan memastikan transisi energi berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif. Kemudian, *Bali Compact* dan Peta Jalan Transisi Energi Bali disepakati menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.

Adapun hasil konkret KTT G-20 bidang energi, antara lain, adanya dukungan pendanaan mekanisme transisi energi sebesar 20 miliar dolar AS melalui *Just Energy Transition Program Partnership* (JETP). Kemudian, prioritas pendanaan sebesar 500 juta dolar AS dalam *Asia Zero Emission Community* (AZEC) untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kerja sama serta inisiatif dekarbonisasi publik-swasta.

JETP merupakan hasil kesepakatan yang bertujuan mendukung transisi energi sektor ketenagalistrikan di Indonesia untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. JETP diimplementasikan dengan pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS. Para pihak akan bekerja sama untuk mengembangkan rencana investasi, pembiayaan, dan bantuan teknis yang dituangkan dalam *Comprehensive Investment Plan*. Sedangkan AZEC merupakan inisiatif Jepang untuk mengembangkan kerja sama dengan negara-negara mitra strategis dalam memanfaatkan teknologi, kemampuan teknis dan *knowhow* Jepang, khususnya terkait pemanfaatan sumber daya hidrogen dan ammonia, untuk mendukung negara-negara kawasan Asia melakukan transisi menuju dekarbonisasi/*net zero emission*.

Lalu, bagaimana dengan komitmen Indonesia? Sudah seberapa besar realisasi bauran EBT di Tanah Air?

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan telah mengajukan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dengan target penurunan emisi meningkat dari 29 persen atau setara 835 juta ton CO₂ menjadi 32 persen atau setara 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Kontribusi sektor energi juga meningkat dari 314 juta ton CO₂ menjadi 358 juta ton CO₂. Indonesia berkomitmen mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Kementerian ESDM telah menyusun *Roadmap* transisi energi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui beberapa strategi. Dari sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir, *retirement* PLTU, penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS. Adapun dari sisi *demand* adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan penerapan standar kinerja energi minimum.



Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan telah mengajukan *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)* dengan target penurunan emisi meningkat dari 29 persen atau setara 835 juta ton CO₂ menjadi 32 persen atau setara 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Kontribusi sektor energi juga meningkat dari 314 juta ton CO₂ menjadi 358 juta ton CO₂. Indonesia berkomitmen mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT ditargetkan sekitar 700 GW. Mulai tahun 2030 pembangkit listrik didominasi oleh *Variable Renewable Energy* berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2039, sedangkan *Green Hydrogen* akan diproduksi mulai 2031 yang penggunaannya untuk transportasi dan industri.

Retirement PLTU dilakukan secara bertahap, baik PLN maupun non PLN, berdasarkan kontrak maksimal 30 tahun. Kapasitas PLTU akan meningkat hingga tahun 2030 dan setelah itu tidak ada rencana penambahan PLTU. PLTU terakhir yang beroperasi berakhir pada 2058. Direncanakan juga pengembangan *super grid* dan *smart grid* untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, mengurangi dampak *intermittency*, mengatasi divergensi antara sumber energi terbarukan lokal dan lokasi permintaan energi listrik yang tinggi, serta membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara-negara ASEAN.

Apa saja langkah pemerintah terkait transisi energi di sektor industri?

Langkah kebijakan transisi energi pada sektor industri yang akan dilaksanakan, antara lain:

- Efisiensi energi peralatan dengan potensi penurunan konsumsi energi sebesar 50-60 persen;
- Strategi Elektrifikasi pada industri yang menggunakan *low temperature processes* seperti makanan & minuman, tekstil dan kulit, perangkat elektronik;
- Hidrogen sebagai substitusi Gas, *Green hydrogen* untuk menggantikan gas alam untuk proses pemanasan suhu tinggi mulai dari tahun 2041;
- Substitusi biomassa menggantikan bahan bakar fosil untuk proses pemanasan suhu tinggi, terutama pada industri semen, tetapi juga diterapkan di subsektor lain dengan jumlah yang lebih kecil;
- *Carbon Capture & Storage (CCS)* untuk industri semen dan baja yang menggunakan batu bara dan gas, mulai dari tahun 2036.

Sedangkan pada sektor transportasi, program yang sedang dan akan dilaksanakan antara lain:

- Pemanfaatan Biofuel diproyesikan sebesar 40 persen;
- Penetrasi kendaraan listrik dalam transportasi;
- Penggunaan hidrogen untuk truk;
- Bahan bakar rendah karbon untuk *shipping* dimulai pada tahun 2036 dengan campuran e-amonia, hidrogen, dan biofuel;
- E-fuel (berasal dari biosyngas dan *green hydrogen*) untuk kendaraan;
- *Electric vessels* untuk jarak yang pendek dan/atau *hybrid vessels*;
- Teknologi Efisiensi di sektor transportasi.

Sedangkan untuk di sektor rumah tangga dan komersial akan dilaksanakan penetrasi pada penggunaan kompor listrik/induksi, pengembangan jaringan gas kota dan penerapan program efisiensi energi termasuk mengoptimalkan manajemen energi, Standar Kinerja Energi Minimum.

Terkait bauran energi, pada 2021 porsi EBT dalam bauran energi mencapai 12 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sudah sebesar 2.703 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,5 persen per tahunnya. Dari tahun ke tahun, pemerintah terus meningkatkan porsi bauran EBT.

Total, sudah ada 12,5 GW kapasitas terpasang pembangkit EBT hingga 2022 dengan suplai terbesar berasal dari air, panas bumi, bioenergi, surya, bayu dan hibrida. Adapun dari sisi produksi listrik EBT juga mengalami peningkatan signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015 hanya 23.820 GWh, sementara hingga bulan November 2022 sudah mencapai 57.892,44 GWh.

Untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi dilaksanakan sejumlah strategi, antara lain:

- Pembangunan PLT EBT On Grid (berbasis RUPTL PLN 2021-2030), termasuk PLTS Terapung (Target Kapasitas Terpasang PLT EBT pada 2025: 18,5 GW);
- Implementasi PLTS Atap (Target 2025: 3.610 MW);
- Konversi PLTD ke PLT EBT (PLT Gas sebagai transisi) (target 2025: 499 MW);
- Mandatori B35 (Target 2023: 13,15 juta kL);
- *Co-Firing* Biomassa pada PLTU (target 2025: 10,2 juta ton);
- Penyediaan akses energi modern dengan EBT (skala kecil seperti PLTMH, PLTS dengan target 2025: 1,36 MW);
- Eksplorasi panas bumi oleh pemerintah (target 2025: 9 wilayah panas bumi dengan potensi pengembangan sebesar 295 MW);
- Implementasi EBT *Off Grid* dan Pemanfaatan Langsung (target 2025: 100 persen RE dan 100 persen RDB – Biogas 30.043 ribu m3).

Hal apa saja yang menjadi tantangan dalam menjalankan transisi energi di Indonesia?

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak kepada semua sisi kehidupan, di antaranya konsumsi listrik per kapita yang cenderung stagnan dan *oversupply* di beberapa wilayah sistem ketenagalistrikan. Selain itu, situasi konflik Geopolitik yang terjadi mengakibatkan terganggunya suplai energi global sehingga harga komoditas energi menjadi tinggi.

Namun demikian, pemulihan ekonomi pasca Covid-19 telah menunjukkan tren positif sehingga pemenuhan kebutuhan energi listrik jangka panjang tetap menjadi prioritas. Selain pertumbuhan *demand*, beberapa tantangan pengembangan EBT yang dihadapi hingga saat ini, antara lain, mengenai keekonomian dan teknologi. Dalam hal ini, diperlukan inovasi teknologi dan *good engineering practices* di bidang EBT guna mendorong keamanan, mendukung sistem tenaga listrik dan harga yang semakin kompetitif.

Tantangan kedua yaitu soal infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur pendukung dalam pembangunan EBT yang harus dikembangkan secara *in situ*. Kemudian juga mengenai pasokan dan permintaan, pengembangan pembangkit listrik

EBT dan non-listrik (seperti bahan bakar nabati) mempertimbangkan keseimbangan *supply* dan pertumbuhan permintaan *demand*.

Pendanaan juga menjadi tantangan. Nilai investasi yang tinggi, tapi ada keterbatasan pendanaan dengan bunga rendah dan tingginya risiko pengembangan. Tantangan lainnya adalah dinamika sosial, yaitu tata kelola yang menyeimbangkan aspek kemasyarakatan (*people centered development*).

Bagaimana bapak menilai kontribusi BPK dalam mengawal agenda pemerintah di sektor energi?

BPK sebagai lembaga pengawasan finansial punya peran penting dalam mengawal implementasi program penting sektor energi agar lebih akuntabel dan transparan. Peran BPK dalam mengawal agenda pemerintah di sektor energi mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pelayanan publik.

BPK saat ini juga memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya program *Net Zero Emission* (NZE) secara konsisten dan telah mampu memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret dalam memastikan setiap mobilisasi keuangan dilakukan sesuai dengan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan keuangan. Dengan begitu, ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik baik dari sisi efektivitas program dan kebijakan.

BPK diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi transparansi informasi non-keuangan, seperti kebijakan yang disematkan prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Sustainability, and Governance*) untuk mendukung transisi energi hijau.

Menurut bapak, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan kedepannya di sektor Energi?

Kami harap BPK terus meningkatkan aksi kolaborasi antar kementerian dan *stakeholder* terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis khususnya sektor energi. Langkah ini dilakukan agar sesuai koridor dan mengantisipasi adanya penyelewengan demi mempercepat pembangunan ekonomi yang akuntabel.

Semua pihak terkait dapat membantu pendampingan dalam pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga mengomunikasikan tindak lanjut rekomendasi BPK. ~

Kenali dan Cegah

Praktik Perundungan

DI TEMPAT KERJA

PENGUCILAN SOSIAL DI TEMPAT KERJA MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PERUNDUNGAN.



Dalam beberapa kasus, intimidasi dapat menyebabkan tuduhan berbohong, pengucilan lebih lanjut, promosi yang ditolak, atau pembalasan lainnya. Dari sisi kelembagaan, *bullying* institusional terjadi ketika tempat kerja menerima, mengizinkan, dan bahkan mendorong terjadinya *bullying*. Penindasan ini mungkin termasuk tujuan produksi yang tidak realistis, lembur paksa, atau memilih mereka yang tidak bisa mengikuti.

Praktik perundungan bisa terjadi dimana saja, termasuk di tempat kerja atau yang dikenal dengan *workplace bullying*. Perundungan di tempat kerja harus dicegah dan diberantas bersama. Karena jika tidak, orang yang sering mengganggu akan terus melakukan intimidasi.

Employee Care Center (ECC) BPK RI dalam ulasannya mengenai *workplace bullying* menjelaskan, berdasarkan Einarsen, et al (2011), *workplace bullying* adalah perilaku *harassing* (perilaku mengganggu), *offending* (menyerang), dan *socially excluding someone* (mengeluarkan seseorang dari kelompok sosial) atau mempengaruhi pekerjaan seseorang secara negatif.

Untuk disebut *workplace bullying*, peristiwa tersebut terjadi setidaknya sekali sepekan dan terulang sampai dengan enam bulan lamanya. Menurut ECC, ada sejumlah bentuk *workplace bullying*. Perundungan salah satunya bisa berbentuk lisan. Ini bisa termasuk ejekan, penghinaan, gosip atau pelecehan lisan lainnya.

Bentuk lainnya adalah intimidasi. Ini mungkin termasuk ancaman, pengucilan sosial di tempat kerja, mata-mata, atau pelanggaran privasi lainnya. Perundungan juga bisa terkait prestasi kerja. "Contohnya termasuk sabotase atau gangguan kerja, atau mencuri dan menerima pujian atas ide-ide dari seseorang."

Lalu, siapa saja yang biasanya menjadi pelaku *workplace bullying*. Pelaku biasanya seseorang yang mempunyai jabatan atau wewenang di atas korbannya. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan yang tidak digunakan dengan semestinya (Einarsen, et al. 2003). Pemimpin yang memiliki kuasa atas orang lain tersebut cenderung melakukan *bullying* dengan cara bertindak semena-mena, membesarkan diri, meremehkan bawahan, serta penggunaan manajemen konflik otoriter.

Selain itu, beberapa studi telah melaporkan bahwa rekan kerja menjadi sumber yang paling sering melakukan perilaku agresi di tempat kerja. "Intinya, pelaku dari *workplace bullying* dapat berasal dari kalangan apapun di tempat kerja, misalnya supervisor, rekan kerja, dan kolega." ~

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA DI-BULLY DI TEMPAT KERJA?



1. DOKUMENTASIKAN INTIMIDASI.

Catat tanggal, waktu, tempat terjadinya *bullying*, dan orang lain yang berada di dalam ruangan.

2. SIMPAN BUKTI FISIK.

Simpan catatan, komentar kasar, atau email yang mengancam yang Anda terima. Laporkan intimidasi. Tempat kerja Anda mungkin memiliki orang yang ditunjuk yang dapat Anda diajak bicara jika Anda merasa tidak aman untuk berbicara dengan atasan langsung Anda.

3. HADAPI SI PENGGANGGU.

Bawalah saksi tepercaya, seperti rekan kerja atau *supervisor*, dan minta mereka untuk berhenti — jika Anda merasa nyaman melakukannya.

4. Mencari Bimbingan Hukum.

Pertimbangkan untuk berbicara dengan pengacara, tergantung pada keadaan intimidasi.

5. JANGKAU ORANG LAIN.

Rekan kerja mungkin dapat menawarkan dukungan. Anda juga dapat berbicara dengan terapis. Mereka dapat memberikan dukungan profesional dan membantu Anda mencari cara untuk mengatasi efek intimidasi saat Anda mengambil tindakan lain.

DAMPAK FISIK:

- Merasa sakit atau cemas sebelum bekerja atau ketika memikirkan pekerjaan.
- Memiliki gejala fisik, seperti masalah pencernaan atau tekanan darah tinggi.
- Memiliki risiko lebih tinggi untuk diabetes tipe 2.
- Mengalami kesulitan bangun atau mendapatkan tidur yang berkualitas.
- Memiliki gejala somatik, seperti sakit kepala dan nafsu makan berkurang.

Dampak *Bullying* terhadap Fisik dan Psikis

DAMPAK PSIKIS:

- Berpikir dan mengkhawatirkan pekerjaan terus-menerus, bahkan selama waktu istirahat.
- Takut bekerja dan ingin tinggal di rumah.
- Kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya Anda sukai.
- Peningkatan risiko depresi dan kecemasan.
- Pikiran bunuh diri, tingkat percaya diri yang rendah.
- Keraguan diri, membayangkan intimidasi.



Keajaiban Berpuasa Bagi Kesehatan Fisik dan Mental

PENELITIAN MEMBUKTIKAN BAHWA KADAR GLIKOGEN MAMPU DIBONGKAR DALAM WAKTU 16 JAM PUASA. ADAPUN DALAM WAKTU 28 JAM GLIKOGEN BENAR-BENAR HABIS.

FREEPIK



Berpuasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso, berpuasa dapat menyehatkan fisik dan mental. Manfaat itu tak hanya bisa dirasakan orang dewasa, tapi juga anak-anak.

Hal tersebut disampaikan Piprim dalam kegiatan Kajian 2 Ramadhan bertajuk 'Manfaat Puasa dari Aspek Medis' pada Jumat (24/3/2023) yang digelar Majelis Baitul Hasib. Piprim mengatakan, puasa adalah sarana modern yang secara mutakhir diakui mampu melawan diabetes dan obesitas. Puasa juga membuat seseorang menjadi lebih disiplin dan empatik. Malah, menurut Piprim, sebenarnya berpuasa menjadi lebih mudah saat seseorang mengetahui beragam manfaatnya.

"Saat kamu berpuasa, gula darahmu menurun, dan bisa dimanfaatkan cadangannya untuk hati, dan menyerap seluruh lemakmu dan menghasilkan keton, dan keton akan meningkatkan kewaspadaan mental," kata Piprim yang juga konsultan jantung anak.

Ia menjelaskan, ketika seseorang melakukan puasa, maka pertamanya tubuh akan menghabiskan bahan bakar glikogen di dalam liver. Setelah memasuki 16 jam fase puasa, maka tubuh akan beralih membakar lemak.

Sementara di saat yang sama, otak dalam tubuh manusia menjadi satu-satunya organ yang terus aktif bekerja sepanjang waktu. "Nah otak ini *enggak* bisa, tanpa asupan. Sedangkan asupan makanan tidak ada *kan*, oleh karena itu kita punya bahan bakar kedua yang bisa digunakan otak dengan efektif yaitu yang disebut dengan benda keton," ucap dia. Dalam istilah medis, benda keton disebut dengan *beta hidroksibutirat*.

Piprim menyebut penelitian yang diterapkan pada sekelompok mahasiswa selama 40 hari membuktikan bahwa kadar glikogen mampu dibongkar dalam waktu 16 jam puasa. Adapun dalam

waktu 28 jam glikogen benar-benar habis. "Nah pada saat glikogen di sekitar 16 jam inilah kemudian tubuh mulai menggunakan bahan bakar lain untuk bikin gula sendiri," ucap dia.

Setelah 40 hari, gula darah orang yang berpuasa tetap stabil di 70MG/dl. Angka ini dinilai rendah dalam hal pengecekan gula darah. Akan tetapi, beta hidroksibutirat dan *acetoacetate* yang disebut keton itu mulai muncul dan kadarnya menjadi tinggi. Hal itu karena itu akan digunakan oleh otak. Selain itu, lewat puasa tersebut bahan bakar glukosa hanya 60 persen, sementara 60 hingga 65 persen berasal dari benda keton. Sebagai informasi, badan keton diproduksi manusia bahkan saat masih bayi.

"Misalnya disini bagaimana bayi itu sangat cepat memproduksi benda keton ini. Oleh karena itu tidak heran ketika bayi itu baru dilahirkan itu bisa bertahan 2x24 jam tanpa asupan ASI yang cukup karena ASI ibu itu kan awal-awalnya sangat sedikit ya hanya kolostrum saja. Tapi bayi walaupun tidak diberi apa-apa selama 2x24 jam, otaknya tetap bertahan hidup karena beradaptasi membuat beta hidroksibutirat atau benda keton ini lewat *brown fat* yang ada dalam tubuhnya," ucap dia.

Hanya saja, semakin bertumbuh besar bahkan sampai dewasa, metabolisme itu semakin tidak fleksibel. Berbeda dengan anak-anak dimana puasa cukup enam jam maka produksi benda ketonnya sudah cukup tinggi.

"Oleh karena itu kita tidak heran juga anak-anak itu pecicilan padahal dari paginya belum makan misalkan, dan aktivitasnya tidak ada masalah," ucap dia.

Piprim mengatakan, anak belum wajib puasa sehingga tidak perlu dipaksakan. Hanya saja memang perlu diajarkan. Bila ada orang tua yang menanyakan kapan seorang anak kuat berpuasa, ia menjawab itu berbeda-beda tergantung kematangan mental-emosi-spiritual. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pola asuh orang tua.

Saat kamu berpuasa, gula darahmu menurun, dan bisa dimanfaatkan cadangannya untuk hati, dan menyerap seluruh lemakmu dan menghasilkan keton, dan keton akan meningkatkan kewaspadaan mental.



FREPIK

"Berapa lama anak belajar puasa? Usahakan sekuatnya. Jangan terlalu sebentar, jangan terlalu lama. Dulu para sahabat nabi mengajak anak-anak ke masjid lalu dibacakan cerita serta diajak bermain hingga lalai lapar sampai tiba waktu Maghrib," ucap dia.

Selain itu, anak yang seperti apa yang bisa berpuasa, menurut dia adalah anak yang sehat. Bila anak sehat maka sudah jelas aman untuk berpuasa. Anak juga harus diperhatikan asupan cairan dan kalorinya dalam 24 jam. Yaitu pada saat sahur, pada saat buka puasa, dan pada saat setelah shalat tarawih.

Anak yang berpuasa juga perlu dipenuhi kebutuhan nutrisi esensial, yaitu kebutuhan asam amino esensial dan lemak esensial, kebutuhan mikro nutrisi (bisa diperoleh dari asupan protein hewani yang cukup dan aneka sayuran hijau).

"Stop atau kurangi maksimal asupan *junk food* yang tinggi gula dan tepung. Makanan jenis ini tinggi kalori tapi miskin nutrisi, membuat anak cepat lapar kembali," ucap dia.

RESISTEN INSULIN

Kembali membahas soal efek puasa, ia menjelaskan bahwa bahan bakar di dalam tubuh manusia, yaitu darah hanya sekitar 40 kilo kalori. Sedangkan cadangan liver glikogen di hati hanya 300 kilo kalori. Akan tetapi cadangan di jaringan lemak bisa mencapai 400 ribu kilo kalori.

"Jadi kalau pada saat puasa kita bisa mengakses jaringan lemak ini dengan baik dengan leluasa, kita bisa sehari-hari tidak usah

ada asupan makanan bisa *survive*," ucap dia.

Akan tetapi, masalahnya yang mengunci jaringan lemak adalah disebut hormon insulin. Tingginya hormon insulin menyebabkan banyak manusia modern yang sering sakit. Hal itu karena insulin terlalu tinggi akibat makanan tinggi gula dan tepung.

"Nah kondisi tubuh yang *enggak* pernah puasa itu, seperti dapur yang penuh sampah, numpuknya dimana saja," ucap dia. Sehingga kemudian muncul permasalahan yang disebut *insulin resistance*.

Ketika sudah *insulin resistance*, maka muncul penyakit seperti stroke, serangan jantung, kanker, hipertensi, bahkan diabetes, dan obesitas. "Kenapa kita bisa *insulin resistance*, ini lebih kepada pola hidup yang terlalu sering makan tinggi gula dan karbohidrat olahan." Jadi kita makan berkali-kali, gula darah tinggi, level insulin meningkat, *insulin resistance* makin tinggi, gula darah makin tinggi,"

Kemudian apa yang bisa menurunkannya, maka tidak lain menurut dia adalah berpuasa. Seseorang yang berpuasa akan memiliki insulin dengan kadar rendah.

"Pada saat insulinnya sudah rendah, maka barulah gudang-gudang lemak itu dibongkar. Jadi kalau kalori tidak ada yang masuk saat puasa, glikogennya sudah dibongkar duluan sampe kosong, kemudian insulinnya *enggak* ada, barulah ini kemudian gudang lemak ini dibongkar. Jadi kunci untuk membongkar gudang lemak adalah insulinnya direndahkan, salah satunya dengan puasa," ucap dia.

Cara lainnya adalah memakan, tetapi makanan itu tidak merangsang produksi insulin yaitu tidak mengandung karbohidrat cepat serap. "Jadi ini sebetulnya rahasia tetap optimal dalam bekerja adalah gaya hidup seimbang antara olahraga dan berpuasa, disertai dengan istirahat dan tidur yang cukup serta *healthy eating*. Keempat hal tersebut harus dilakukan supaya seseorang menjadi sehat." ~

BPK Sampaikan Dua LHP kepada SKK Migas

PEMERIKSA BPK DIHARAPKAN DAPAT BERPERAN SEBAGAI *CONSULTING PARTNER* BAGI ENTITAS YANG DIPERIKSA GUNA MENDORONG PENINGKATAN KINERJANYA.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto menyerahkan LHP atas SKK Migas kepada Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dua laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). LHP tersebut disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto kepada Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto di kantor SKK Migas di Jakarta, Senin (13/3/2023).

LHP yang diserahkan adalah LHP atas pengembangan lapangan gas unitisasi Jimbaran-Tiung Biru tahun 2017 s/d semester I 2022 di SKK Migas, PT Pertamina EPP Cepu, dan instansi terkait lainnya. Kemudian LHP atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas wilayah kerja West Madura *Offshore* tahun 2021 s/d semester I 2022 di SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Pertamina Hulu Energi WMO, dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Anggota VII BPK menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan yang dilakukan. Mengenai pemeriksaan atas pengembangan lapangan gas unitisasi Jimbaran-Tiung Biru, tujuannya untuk menilai kepatuhan entitas terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam proyek pengembangan tersebut.

"Sedangkan tujuan pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas adalah untuk menilai kepatuhan KKKS terhadap kontrak kerja sama, peraturan perundang-undangan, dan kepatuhan terhadap perhitungan bagi hasil terkait

cost recovery dan PPh Migas," kata Anggota VII BPK.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali permasalahan-permasalahan yang ditemukan, kami menyimpulkan bahwa SKK Migas telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak/perjanjian, dalam semua hal yang material," ungkapnya.

Kesempatan yang sama juga digunakan untuk melaksanakan *entry meeting* pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja operasional SKK Migas. Termasuk juga pengelolaan aset KKKS dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas minyak dan gas bumi tahun anggaran 2022 dan pemeriksaan kepatuhan atas proses alih kelola wilayah kerja Rokan tahun 2021.

Anggota VII BPK berharap agar dua lembaga dapat membangun komunikasi yang efektif saat pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan. Komunikasi itu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai integritas, independensi dan profesionalisme. Pemeriksa BPK diharapkan dapat berperan sebagai *consulting partner* bagi entitas yang diperiksa guna mendorong peningkatan kinerjanya.

"Antara BPK dan SKK Migas harus memiliki komitmen untuk bekerja sama, agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu dan pemeriksa diberikan akses seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan pemeriksaan," kata dia. ~

BPK Terima LKPD DKI Jakarta Tahun 2022 *Unaudited*

OPINI BPK ATAS LKPD PEMPROV DKI JAKARTA SELAMA LIMA TAHUN BERTURUT-TURUT ADALAH WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 *unaudited*. LKPD tersebut diserahkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit di kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/3/2023).

"Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membangun sinergi dan kolaborasi yang positif antarlembaga sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing," kata Anggota V BPK.

Menurut dia, penyerahan LKPD ini mencerminkan kepatuhan Pemprov DKI Jakarta terhadap undang-undang keuangan negara, khususnya pasal 56 dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. *Beleid* tersebut antara lain menyatakan bahwa LKPD disampaikan oleh gubernur kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit

“Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta telah berupaya memenuhi kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya secara tepat waktu.”

"Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta telah berupaya memenuhi kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya secara tepat waktu," ujar Anggota V BPK.

Dia juga mengatakan bahwa opini BPK atas LKPD Pemprov DKI Jakarta selama lima tahun berturut-turut adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Untuk itu, saya mengingatkan bahwa pencapaian WTP bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Opini atas LK lebih menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemda dalam mengelola keuangan dan opini WTP yang diperoleh pemda hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan agar berguna dan berhasil bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Anggota V BPK.

Menutup sambutannya, Anggota V BPK berharap dukungan dari Pj Gubernur Pemprov DKI Jakarta beserta jajarannya. Dukungan tersebut berupa penyampaian data dan informasi akurat yang diperlukan kepada tim pemeriksa. Dengan begitu, proses pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dapat dilaksanakan secara tepat waktu. ~

BPK Kunjungi Perusahaan Pengolahan Limbah B3

TUJUAN KUNJUNGAN KERJA INI ADALAH UNTUK MEMPEROLEH DATA DAN INFORMASI TERKAIT PROSES PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH PT PPLI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan kunjungan kerja ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/3/2023). Kunjungan ini dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota IV BPK Haerul Saleh bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio Ridho Sani.

Anggota IV BPK mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh PT PPLi. Kemudian tantangan dan risiko yang dihadapi, termasuk risiko pencemaran lingkungan, dan upaya mitigasi risiko tersebut.

BPK juga ingin mengetahui hasil pemantauan Kementerian LHK atas pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT PPLi dan peta pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Mulai dari penghasil limbah, pihak pengelola limbah, pengawas limbah, serta mekanisme pengendalian limbah B3.

Pengetahuan yang didapat dari kunjungan kerja ini akan dimanfaatkan dalam pemeriksaan BPK atas Kementerian



LHK. Informasi mengenai risiko pengelolaan limbah B3 juga dapat menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan limbah B3.

Anggota IV BPK pun menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tahun 2017 s/d 2020. Terkait itu, dia menyimpulkan ada permasalahan dalam hal regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan sumber daya, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

"Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka akan mempengaruhi efektivitas kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi," kata Anggota IV BPK.

Berdasarkan data Kementerian LHK, volume limbah B3 dari pertambangan, energi, dan migas yang dikelola dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 berkisar antara 39 juta ton-90 juta ton. Sementara volume limbah yang dimanfaatkan hanya berkisar antara 3-4 juta ton.

"Data Kementerian LHK tersebut tidak menampilkan volume limbah B3 yang diproduksi dari kegiatan pertambangan, energi, dan migas. Sehingga tidak diketahui volume limbah B3 yang luput dari pengelolaan/ pemanfaatan dan berpotensi berdampak buruk kepada lingkungan sekitar," ujar Anggota IV BPK. ~



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota IV BPK Haerul Saleh saat kunjungan ke PT PPLi.



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Pelaporan Pemerintah untuk Perubahan Iklim

NEGARA-NEGARA DI DUNIA DIHARAPKAN MENYADARI KONDISI INI DENGAN MELAKUKAN SEMUA CARA UNTUK BERADAPTASI DAN MEMITIGASI PERUBAHAN IKLIM. SATU DARI SEKIAN BANYAK CARA ADALAH MEMPERBAIKI DATA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM.



JUMANSYAH

**DOSEN TETAP FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS,
UNIVERSITAS AL AZHAR
INDONESIA**

Dalam rangka merespons isu dan perkembangan perubahan iklim, World Bank merilis laporan tahun 2022 berjudul "Sovereign Climate and Nature Reporting: Proposal for a Risks and Opportunities Disclosure Framework". Salah satu isinya adalah mengundang Internasional Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Board, untuk menyusun kerangka pelaporan perubahan iklim dan sumber daya alam. IPSAS Board merupakan bagian dari IFAC yang mengurus standar sektor publik. Sebenarnya seberapa pentingkah pelaporan ini? Beberapa data dapat kita cermati terkait hal ini.

Pertama, diprediksi oleh riset World Bank (2021) bahwa gangguan atau kerusakan ekosistem menyebabkan adanya penurunan *Gross Domestic Product* (GDP) secara global sekitar 2,7 Triliun Dollar AS pada tahun 2030. Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan menjadi wilayah yang paling terdampak dengan masing-masing penurunan sebesar 9,7% dan 6,5%. Negara-negara di dunia diharapkan menyadari kondisi ini dengan melakukan semua cara untuk beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Satu dari sekian banyak cara adalah memperbaiki data mengenai perubahan iklim. Pelaporan mengenai perubahan iklim yang disebutkan World Bank dalam laporannya adalah upaya untuk menggugah kesadaran dan menginisiasi terbentuknya data yang akurat dan konsisten, untuk mengambil keputusan terbaik terkait perubahan iklim.

Kedua, Investor yang berinvestasi pada obligasi pemerintah jumlahnya sangat signifikan dan membutuhkan informasi risiko mengenai perubahan iklim dari pemerintah. Persentase obligasi negara yang diterbitkan pemerintah adalah 40% dari total 100 triliun dollar AS pasar obligasi global. Dengan persentase sebesar itu, ternyata investasi obligasi pemerintah belum tercakup dalam International Sustainability Reporting Framework yang lebih berfokus pada pelaporan korporat. Rerangka tersebut belum mencakup investasi sektor publik, penerbitan obligasi pemerintah, investasi dana pensiun publik, atau keuangan pembangunan internasional. Artinya meskipun pelaporan ini sudah dilakukan oleh sektor swasta, namun masih banyak yang belum tercakup dalam laporan sustainabilitas yang memberikan informasi mengenai risiko dan peluang perubahan iklim. Padahal salah satu sumber informasi penting bagi investor untuk mengambil keputusan investasi adalah pengungkapan mengenai perubahan iklim.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.



MODEL TCFD

Model pelaporan perubahan iklim yang sementara ini berjalan adalah model pelaporan yang digunakan oleh korporasi. Model ini dikembangkan oleh TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Model ini terdiri dari 4 tema yang merupakan representasi elemen-elemen inti bagaimana organisasi beroperasi, yaitu tata kelola (*governance*), strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.

Tata Kelola (*governance*) mendeskripsi tata kelola organisasi dalam menghadapi risiko dan peluang perubahan iklim. Pada tema *governance*, pemerintah dapat mengungkapkan tata kelola terkait perubahan iklim. Misalnya kementerian mana yang bertugas mengidentifikasi, menilai, mengkuantifikasi, dan mengelola risiko finansial dan ekonomi terkait perubahan iklim. Pada tema ini termasuk pengungkapan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dalam rangka mengelola risiko dan menangkap peluang-peluang terkait perubahan iklim.

Strategi mendeskripsi dampak aktual dan potensial dari risiko dan peluang perubahan iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan organisasi. Pada tema strategi, pemerintah dapat mengungkapkan dampak perubahan iklim (baik aktual maupun potensial), strategi dan perencanaan keuangan terkait perubahan iklim. Pemerintah dapat mengungkapkan identifikasi risiko dan peluang dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Pemerintah juga dapat mengungkapkan risiko pemerintah mengenai resiliensi yang mempertimbangkan beberapa skenario berbeda dalam perubahan iklim.

Manajemen risiko mendeskripsi proses-proses yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan iklim. Pada tema manajemen risiko, pemerintah dapat mengungkapkan bagaimana pemerintah mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko perubahan iklim. Dalam hal ini, termasuk mengungkapkan kementerian mana yang bertanggungjawab

” **Persentase obligasi negara yang diterbitkan pemerintah adalah 40% dari total 100 triliun dollar AS pasar obligasi global. Dengan persentase sebesar itu, ternyata investasi obligasi pemerintah belum tercakup dalam International Sustainability Reporting Framework yang lebih berfokus pada pelaporan korporat.**

untuk menilai dan menelusuri risiko yang sedang berlangsung. Selain itu, pemerintah juga dapat mengungkapkan bagaimana mengintegrasikan risiko perubahan iklim ini ke dalam manajemen risiko, manajemen keuangan, dan perencanaan ekonomi pemerintah secara keseluruhan.

Metrik dan target digunakan untuk menilai dan mengelola risiko dan peluang yang berkaitan dengan perubahan iklim. Pada tema metrik dan target, pemerintah dapat mengungkapkan metrik dan target yang digunakan untuk menilai dan mengelola risiko dan peluang perubahan iklim. Pemerintah mengungkapkan metrik yang digunakan untuk menilai risiko dan peluang perubahan iklim yang sejalan dengan strategi negara dan proses manajemen risiko.

CLIMATE-NATURE NEXUS

Selain melaporkan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target mengenai risiko dan peluang perubahan iklim, laporan World Bank (2022) juga menekankan pentingnya alam (*nature*) dalam mengelola risiko dan peluang perubahan iklim. Pengelolaan perubahan iklim akan lebih efektif jika mempertimbangkan interaksi antara iklim dan alam, *climate-nature nexus*. Finance for Biodiversity Initiative dalam laporan "The Climate-Nature Nexus: Implications for the Financial Sector" (2021), mengungkapkan bahwa hubungan antara perubahan iklim dan kerugian karena kerusakan alam (*nature loss*) dapat terlihat pada risiko-risiko fisik, peluang-peluang adaptasi iklim, risiko transisi, dan peluang transisi.

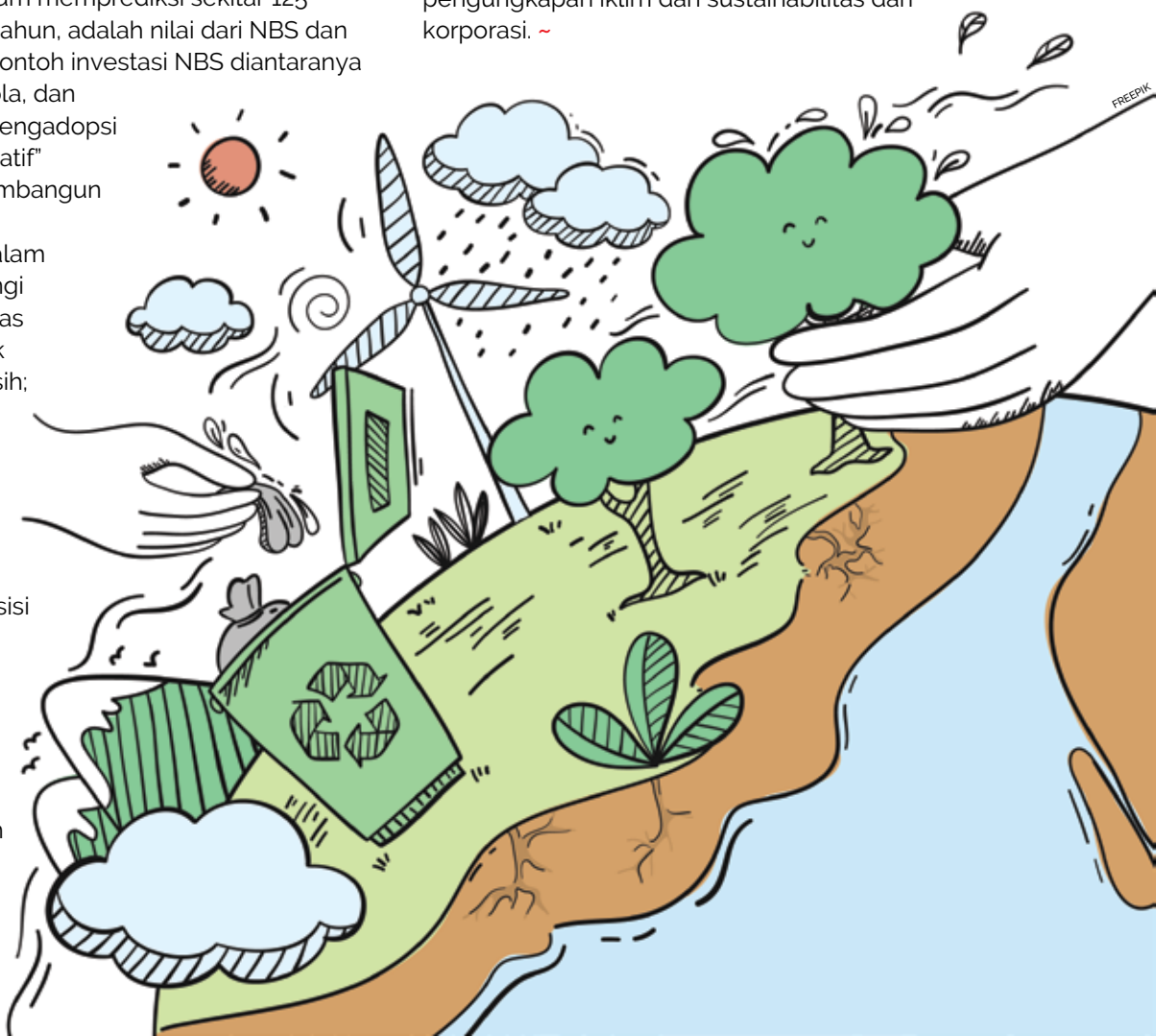
Risiko kerugian karena kerusakan alam (*nature loss*) secara fisik melipatgandakan risiko perubahan iklim dalam pertanian, kehutanan, perikanan, utilitas, dan pembangunan infrastruktur. Perhatian yang rendah terhadap alam, akan memperburuk upaya mengelola perubahan iklim. Pendekatan solusi berbasis alam atau *Nature-Based Solutions* (NBS) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perhatian terhadap alam yang kemudian membantu mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

World Economic Forum memprediksi sekitar 125 Triliun Dollar AS per tahun, adalah nilai dari NBS dan *ecosystem services*. Contoh investasi NBS diantaranya melindungi, mengelola, dan merestorasi hutan; mengadopsi "pendekatan regeneratif" dalam pertanian, membangun lahan basah buatan (*artificial wetlands*) dalam kota untuk mengurangi banjir; mengelola batas air (*watersheds*) untuk menyediakan air bersih; dan merestorasi mangrove untuk memitigasi badai (World Bank, 2022).

Dalam hal risiko dan peluang transisi, transisi bersama iklim-alam (*joint climate-nature transition*) tidak hanya berfokus pada nol emisi karbon tetapi juga dampak positif bersih dari alam. Artinya selain mencapai

tujuan penurunan emisi karbon juga mendapatkan dampak-dampak positif dari alam. Dampak positif transisi bersama ini dapat dilihat melalui peningkatan nilai investasi solusi berbasis alam atau *Nature-based Solutions* (NBS) yang pada akhirnya akan memperbaiki resiliensi dan kesehatan. Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam NBS ini. Indonesia diprediksi memiliki potensi 20% dari potensi NBS global (Daniel Oehling dalam Jakarta Globe, 2023).

Penekanan pada pentingnya pelaporan pemerintah untuk perubahan iklim dan alam, harus ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Pelaporan atau pengungkapan perubahan iklim diyakini investor sebagai mekanisme untuk mengelola risiko perubahan iklim. Pemerintah agak sedikit berbeda, karena begitu banyak risiko yang harus dihadapi pemerintah terkait perubahan iklim, tidak dapat hanya diselesaikan dengan satu pengungkapan atau pelaporan. Tetapi setidaknya melalui pengungkapan atau pelaporan perubahan iklim ini, pemerintah mengirimkan pesan atau implikasi etis kepada semua pihak yang perhatian terhadap perubahan iklim. Pelaporan pemerintah mengenai perubahan iklim tersebut juga dapat memberikan *spillover effect* untuk meningkatnya pengungkapan lainnya, misalnya pengungkapan iklim dan sustainabilitas dari korporasi. ~





Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



1-4
Entry meeting dan penyerahan LHP LKPP Unaudited dihadiri Pimpinan BPK RI, 28 Maret 2023. LKPP tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, selaku Wakil Pemerintah kepada Ketua BPK, Isma Yatun.



5-7
Tarhib Ramadhan dihadiri oleh Ketua BPK, Isma Yatun, 17 Maret 2023.

8
Courtesy call Ketua BPK, Isma Yatun dengan Bank Mandiri, 21 Maret 2023.

9
Audiensi Ketua BPK, Isma Yatun dengan Pengurus Soft Tenis Indonesia, 24 Maret 2023.



10



11



12

10-12
Ketua BPK, Isma Yatun menghadiri pelantikan Ketua dan Wakil Ketua MK pada 20 Maret 2023. Pelantikan tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo.

13-14
Penyerahan LHP atas kepatuhan pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan tahun anggaran 2021 dan 2022 (s.d. semester I) oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, di Kalimantan Barat, 1 Maret 2023.

15
Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Achsanul Qosasi, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama (Dirut), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, di Nusa Dua, Bali, 13 Maret 2023.



13



14



15



16



17



18



19



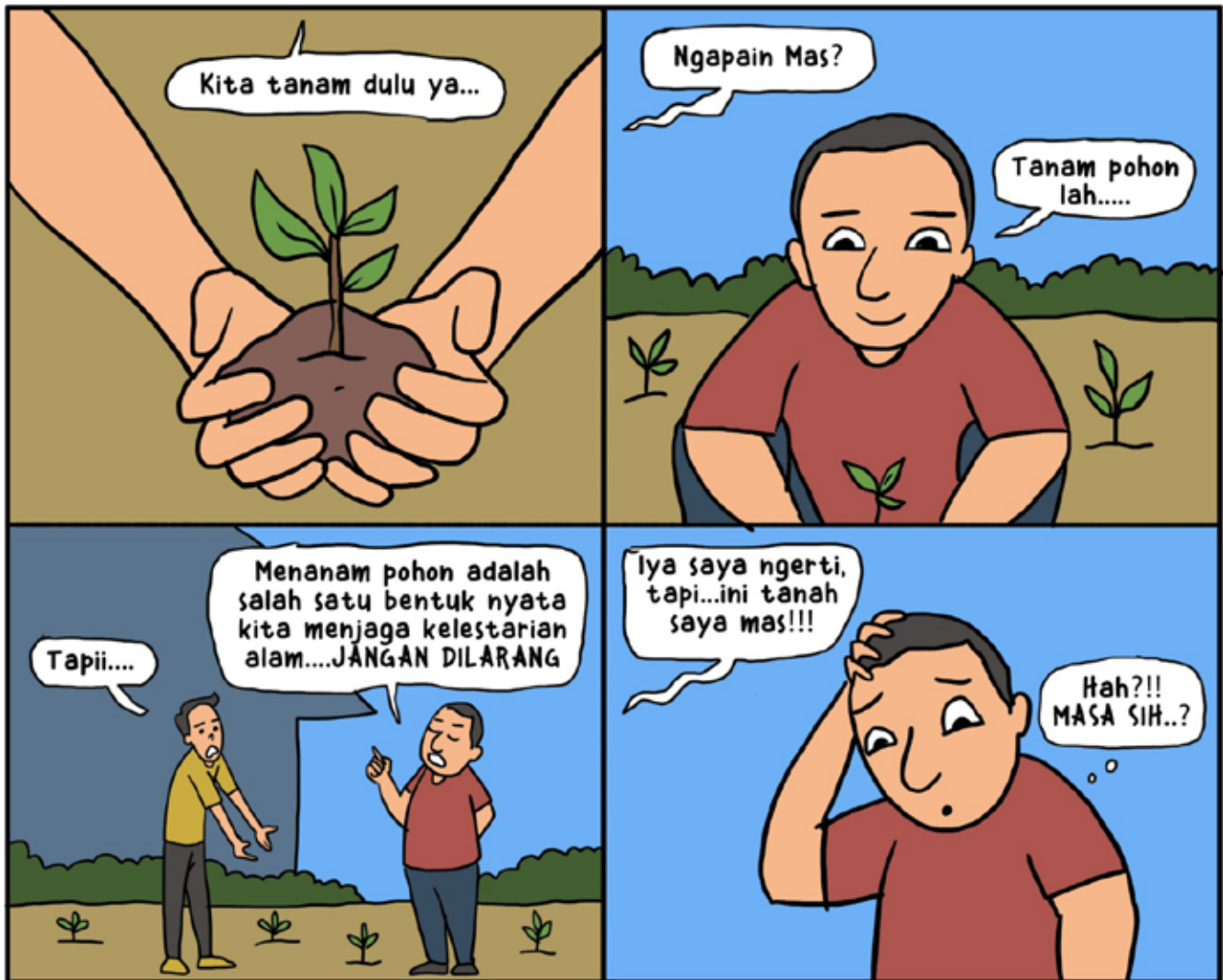
20

16-18
Ketua BPK, Isma Yatun dan Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang menghadiri Peringatan Dharma Santi Hari Raya Nyepi di Bali, 31 Maret 2023.



21

19-21
Supervisi Pelindo dan Pertamina dihadiri oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto di Makassar, 15 Maret 2023.



KUIS

Apakah manfaat besar dari transformasi digital, seperti yang disampaikan Wakil Ketua BPK kepada *Warta Pemeriksa* pada edisi Februari 2023?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Pengamanan **Password**



- **Gunakan *password* yang kuat**

Panjang *password* minimal 8 karakter.

- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.

- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

- **Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri**
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan **Password**

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."

HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760

FOTO: THOROMAN - PIXELS



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri